

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini membuat manajemen yang lebih kondusif di sekolah. Hal tersebut agar dapat menampung seluruh keinginan sekaligus meningkatkan peran berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru yang ditawarkan dalam manajemen sekolah. MBS diharapkan dapat untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Sekolah harus bisa membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Hal tersebut untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah. Terutama dalam peningkatan pendidikan diperlukan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan maka diperlukan suatu wadah yang dapat menggali peran masyarakat yaitu melalui komite sekolah di setiap satuan pendidikan.

Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Komite Sekolah semakin bergulir ketika diadakannya

otonomi sekolah. Komite sekolah merupakan organisasi formal dalam sekolah. Sekolah sudah seharusnya memiliki organisasi agar pelaksanaan tujuan, visi, dan misi sekolah tercapai. Organisasi menghendaki untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan sekolah dan untuk mencapai tujuannya dibagi sesuai fungsi, peranan dan wewenang yang telah ditentukan. Organisasi formal menurut Wukir(2013: 3) dicirikan oleh adanya seperangkat aturan struktur dan prosedur organisasi yang tetap biasanya mempunyai struktur yang menunjukkan rantai komando dan mempunyai beberapa tingkatan manajemen.

Komite sekolah sebagai organisasi formal merupakan organisasi yang memiliki struktur yang jelas dan hubungan antar individu satu dengan yang lainnya jelas. Pemimpin yang diangkat dalam komite sekolah memiliki surat keputusan dan kapasitas pimpinan tergantung adanya penghargaan dan hukuman. Komite sekolah memiliki struktur yang jelas, kaku dan terdefinisi. Selain itu organisasi komite sekolah merupakan organisasi resmi, memiliki wewenang dan tanggung jawab. Pengertian komite sekolah dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah tidak terikat dengan pemerintah lainnya. Komite sekolah mempunyai kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. pengelolaan sekolah dijalankan oleh dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Keikutsertaan orang tua wali murid dan masyarakat diperlukan untuk sekolah-sekolah yang berada di jantung masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan. Maka dibentuklah komite sekolah sesuai yang telah ditetapkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, merupakan amanat dari UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat. Dengan kata lain keberhasilan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat dapat membantu pengembangan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik Majid(2014:15). Pembelajaran tidak terbatas pada proses intelektual atau kognitif semata tetapi dapat juga berbentuk proses pembentukan sikap perilaku atau afektif. Pembentukan sikap perilaku melibatkan pemberian contoh atau model untuk ditiru peserta didik. Komite sekolah juga berperan dalam pembelajaran, karena komite sekolah merupakan lembaga otonom yang dapat membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah berhak menentukan kurikulum apa yang cocok dan sesuai dengan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah.

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam pembelajaran komite sekolah belum berperan aktif dalam peningkatan mutu. Kebanyakan komite sekolah dalam melaksanakan perannya hanya pada saat dibutuhkannya bantuan-bantuan pendidikan. Komite sekolah lebih berperan sebagai pendukung pengumpulan dana dibandingkan melaksanakan perannya

dalam proses pendidikan. Sehingga seringkali komite sekolah sebagai formalitas suatu pendidikan. Bahkan terdapat beberapa organisasi komite sekolah yang tidak membantu pendidikan sekolah.

Sesuai dengan berita yang dimuat(suaramerdeka:2013) yang diakses pada tanggal 22 April 2014 menceritakan tentang anggapan bahwa komite sekolah dianggap sebagai suatu alasan untuk pungutan liar (pungli). Komite sekolah berperan sebagai pihak yang memunculkan pungutan-pungutan liar, demikian laporan dan evaluasi Ombudsman RI dalam Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013. Data di mana dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2013/2014, masih marak pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Bahkan, hal tersebut terjadi hampir secara merata di seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa selama ini dalam masyarakat anggapan mengenai komite sekolah hanya dianggap sebagai agen pendukung dalam memperoleh dana. Oleh karena itu terjadi maraknya berita mengenai pungutan liar dalam sekolah.

Selain itu juga terdapat berita mengenai pungli (Fir:2013) yang diakses pada tanggal 25 Maret 2015 berjudul Pungli Sekolah Marak di Gresik, DPRD Gresik Panen Aduan. Berita yang dimuat dari Radar Gresik menyebutkan bahwa

Pungli sekolah marak di Gresik, DPRD Gresik Panen Aduan. Penerimaan siswa baru mulai dilaksanakan pekan ini. Bersamaan dengan itu, sejumlah pengaduan terkait pungutan sekolah mulai marak. Di SDN 3 Sidokumpul, Kecamatan Gresik Komisi D mendapat laporan pungli sebesar Rp 25.000 per wali murid. Dalihnya pungutan untuk pembangunan musala.” Sementara di SMPN 1 Kebomas pungutan Rp 800.000 untuk membangun laboratorium Bahasa Inggris dan Lab Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ketua Komisi D Chumaidi Maun menyimpulkan seluruh tarikan tidak didasarkan pada Rencana

Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan disetujui Pemkab Gresik melalui Peraturan Bupati (Perbup). “Sebab seluruh pembangunan fasilitas sekolah sudah dibiayai negara. Dan jika ingin melakukan pungutan harus seizin Diknas dan Bupati,” kata Chumaidi Maun.

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sidokumpul, pihak sekolah mengaku membutuhkan dana dari wali murid untuk membangun mushala dan mengadakan bazar. Kasek SDN Sidokumpul 3 Fathoni menyebutkan, pihaknya memang menggelar bazar. Tujuannya untuk mempererat hubungan wali murid.

Hal senada diakui Ketua Komite SDN 3 Sidokumpul, Sutrisno. Menurutnya, sekolah melakukan pungutan karena terpaksa. “Kami malu melihat kondisi musala jelek. Sehingga kami memutuskan untuk menarik iuran pembangunan musala Rp 20.000 persiswa,” kata Sutrisno.

Sementara Kepala SMPN 1 Kebomas, Bisri menjelaskan, pihaknya sangat membutuhkan dana dari siswa. Dana itu akan digunakan untuk pengadaan laboratorium Bahasa Inggris dan laboratorium komputer. “Sekolah sangat membutuhkan lab bahas dan lab TIK. Kami gandeng komite dan menyepakati untuk menarik pungutan Rp 800.000 persiswa. Jika terkumpul dana tersebut harusnya kami terima Rp 210 juta, namun sampai hari ini baru diterima Rp 12 juta,” kata Bisri.

Secara kelembagaan, sekolah negeri sudah banyak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana perbaikan gedung. “Kami akan evaluasi anggaran Diknas yang diberikan ke lembaga pendidikan negeri. Sebab ini masalah pendidikan. Surabaya saja bisa gratis, masak Gresik tidak bisa membasmi pungli,” pungkas Chumaidi.

Berita Surya (Sugiyono:2015) yang diakses pada tanggal 25 Maret

2015 yaitu berjudul DPRD Gresik Akan Evaluasi Fungsi Komite Sekolah.

Komisi D DPRD Gresik akan mengevaluasi peranan Komite Sekolah karena sekarang ini terkesan memihak ke sekolah. Kita mengembalikan fungsi komite sekolah agar pada fungsinya, yaitu sebagai pengawas, pengontrol dalam pengambilan kebijakan sekolah,” kata Syaiku Busiri, anggota Komisi D DPRD Gresik, Selasa (20/1/2015). Komisi D akan memanggil sejumlah komite sekolah yang sering ada masalah, khususnya kasus pungutan liar (Pungli). “Nanti secara acak komite sekolah akan kita panggil,” lanjutnya. Diketahui, selama ini komite sekolah di Gresik disinyalir hanya sebagai lembaga persetujuan pihak sekolah dalam hal pembangunan, dana pungutan liar (Pungli) dan sumbangan.

Kenyataan yang ada dilapangan dan berbagai berita yang muncul di media menunjukkan bahwa peran komite sekolah yang diharapkan oleh pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Komite sekolah di Kabupaten Gresik dianggap hanya sebagai stempel sekolah semata dan perannya tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Bahkan Komite Sekolah dianggap masyarakat sebagai organisasi yang berhak untuk melakukan pungli. Hal yang dilakukan komite sekolah tidak sesuai fungsinya mengakibatkan tujuan pendidikan belum tercapai sepenuhnya dan belum mampu meningkatkan kualitas sekolah. Komite sekolah tidak melaksanakan perannya dengan baik, bahkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu dalam pandangan masyarakat peran komite sekolah belum mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian Purnami (2012:vii) dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMAN 1 Temon” yang diuji secara kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai agen pertimbangan meliputi memberikan pertimbangan penyusunan RKAS, tenaga pendidik yang diperbantukan, bantuan sarana dan prasarana, anggaran sekolah, tetapi belum memberikan pertimbangan terhadap proses pembelajaran. Sebagai badan pendukung meliputi memantau sarana dan prasarana sekolah melalui laporan kepala sekolah pada saat rapat, namun komite sekolah tidak memantau tenaga pendidikan di sekolah dalam hal dana masih berasal dari bantuan orang tua siswa melalui iuran komite sekolah. Komite sekolah belum berhasil mendapatkan dana dari masyarakat sekitar seperti dari dunia usaha atau dunia industri.

Selanjutnya sebagai badan pengontrol meliputi memantau organisasi sekolah melalui laporan rapat dari kepala sekolah pada saat rapat, memantau anggaran pendidikan yang dilakukan selama tiga kali dalam setahun (awal tahun untuk memantau perencanaan anggaran, pertengahan tahun untuk memantau jumlah anggaran yang masuk dan yang telah digunakan, dan akhir tahun untuk evaluasi anggaran sekolah) dan memantau output pendidikan melalui jumlah angka partisipasi siswa, angka bertahan siswa dan hasil ujian sekolah. Yang terakhir sebagai bahan penghubung meliputi menghubungkan sekolah dengan masyarakat dan lembaga lain, menyosialisasikan program sekolah kepada orang tua siswa melalui rapat sekolah dan surat edaran, dan menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada sekolah sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam penyusunan program sekolah.

Hasil penelitian tersebut dapat membantu penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan memperhatikan peran komite sekolah. Dari penelitian yang akan dilakukan akan membuktikan penting atau tidaknya keberadaan komite sekolah bagi sekolah tersebut terutama di sekolah dasar dalam hal pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SDN Gending, SDN Indro, SDN 2 Sidomoro, SDN 2 Randuagung, SDN Prambangan dan SDN Kedanyang. Tempat penelitian tersebut dipilih karena pertimbangan peneliti sesuai kriteria yang ditentukan. Selain itu, tempat penelitian merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum KTSP, karena dalam kurikulum KTSP komite sekolah dapat memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Tempat tersebut juga diperoleh peneliti dari wawancara dengan ketua kepala sekolah kecamatan Kebomas.

Berawal dari latar belakang diatas, maka peneliti memilih untuk mengambil judul “Peran komite sekolah dalam menunjang pembelajaran di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana keterlibatan komite sekolah dalam menunjang pendidikan di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
- 2) Bagaimana program kerja komite sekolah di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
- 3) Bagaimana peran komite sekolah terhadap pembelajaran di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui keterlibatan komite sekolah dalam menunjang pendidikan di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik??
- 2) Untuk program kerja komite sekolah di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
- 3) Untuk mengetahui peran komite sekolah terhadap pembelajaran di SD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti yaitu dapat meningkatkan pemahaman peneliti melalui pengamatan secara langsung di lapangan tentang peran komite sekolah dalam menunjang pembelajaran di SDN Gending, SDN Indro, SDN 2 Sidomoro, SDN 2 Randuagung, SDN Prambangan dan SDN Kedanyang. Manfaat yang dapat diperoleh siswa SDN Gending, SDN Indro, SDN 2 Sidomoro, SDN 2 Randuagung, SDN Prambangan dan SDN Kedanyang yaitu dapat meningkatkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan yang diadakan komite sekolah dan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dalam program kerja pembelajaran yang diadakan komite sekolah. Bagi sekolah penelitian ini dapat memberikan masukan tentang perbaikan kualitas organisasi komite sekolah sehingga dapat mempertahankan keeksistensian komite sekolah. Sedangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan peran komite sekolah.

1.5 Asumsi Penelitian

- 1) Komite sekolah ada dan terlibat dalam menunjang pembelajaran di SD.
- 2) Komite Sekolah melaksanakan peran dan fungsi komite sekolah.
- 3) Komite sekolah dapat secara kooperatif mendukung pelaksanaan penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan